



REKONSTRUKSI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN SUKARNO TENTANG TOLERANSI TAHUN 1926-1966 DAN RELEVANSINYA PADA MASYARAKAT INDONESIA DI ERA ABAD XXI

I Wayan Pardi¹⁾, I Wayan Lasmawan²⁾, I Wayan Suastra³⁾ Anantawikrama Tungga Atmadja⁴⁾

Universitas Pendidikan Ganesha

E-mail : wayan.pardi@undiksha.ac.id, wayan.lasmawan@undiksha.ac.id,
wayan.suastra@undiksha.ac.id, [anantawikrama t atmadja@undiksha.ac.id](mailto:anantawikrama_t_atmadja@undiksha.ac.id).

Info Artikel

Masuk: 1 Desember 2022
Diterima: 15 Januari 2023
Terbit: 1 Februari 2023

Keywords:

Soekarno, Tolerance, and Indonesian Society

Abstract

The aim of writing this article is to reconstruct or rebuild Sukarno's thoughts about tolerance in 1926-1966 to be applied to Indonesian society in the 21st century. Meanwhile, the specific aim is to formulate Sukarno's thoughts on tolerance, and analyze the relevance of Sukarno's thoughts on tolerance to Indonesian society in the 21st century. The method used is the historical writing method. The results of the discussion show that Sukarno's thoughts about tolerance and his efforts to realize an attitude of tolerance took the form of: Initiating the unification of the ideologies of Nationalism, Islamism, Marxism, and putting them into practice to become Nasakom in 1960; Initiating the ideology of Marhaenism; Establishing PNI; Establishing PPPKI; Striving for the unification of PNI-Baru and Partindo; Embracing Ahmadiyya; Conceptualizing Pancasila; Revising the preamble to the 1945 Constitution and the Jakarta Charter version of Pancasila; Establishing the motto Bhinneka Tunggal Ika; Initiating Guided Democracy; and Rejecting the dissolution of the Nasakom concept after G30S. What's even more interesting is that Sukarno consistently fought for the idea of tolerance from the time of the national movement until the end of his life. If we observe the vertical and horizontal conflicts that often occur in Indonesia, Sukarno's thoughts about tolerance are still very relevant to apply to Indonesian society in the 21st century.

Kata kunci:

Soekarno, Toleransi, dan Masyarakat Indonesia

Corresponding Author :

I Wayan Pardi, e-mail :

wayan.pardi@undiksha.ac.id

Abstrak

Penulisan artikel ini bertujuan untuk merekonstruksi atau membangun kembali pemikiran-pemikiran Sukarno tentang toleransi tahun 1926-1966 untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia di era abad XXI. Sementara itu, tujuan khususnya adalah untuk merumuskan pemikiran-pemikiran Sukarno tentang toleransi, dan menganalisis relevansi pemikiran Sukarno tentang toleransi pada masyarakat Indonesia di era abad XXI. Metode yang digunakan adalah metode penulisan sejarah. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pemikiran Sukarno tentang toleransi dan upayanya dalam mewujudkan sikap toleransi berupa: Menggagas penyatuan ideologi Nasionalisme, Islamisme, Marxisme, dan dipraktikkan menjadi Nasakom tahun 1960; Menggagas ideologi Marhaenisme; Mendirikan PNI; Mendirikan PPPKI; Mengupayakan penyatuan PNI-Baru dan Partindo; Merangkul Ahmadiyah; Mengkonsepsikan Pancasila; Merevisi pembukaan UUD 1945 dan Pancasila versi Piagam Jakarta; Menetapkan semboyan Bhineka Tunggal Ika; Menggagas Demokrasi Terpimpin; dan Menolak pembubaran konsep Nasakom pasca G30S. Bahkan yang menarik, secara konsisten Sukarno juga memperjuangkan gagasan toleransinya mulai dari zaman pergerakan nasional hingga akhir hayatnya. Jika mengamati konflik-konflik vertikal dan horizontal yang sering terjadi di Indonesia, maka pemikiran Sukarno tentang toleransi masih sangat relevan untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia di era abad XXI.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Ir. Soekarno atau yang lebih dikenal oleh bangsa Indonesia dengan nama Bung Karno adalah presiden pertama Republik Indonesia. Tanpa bermaksud untuk meminggirkan peran tokoh-tokoh bangsa lainnya, Sukarno juga menyandang gelar agung sebagai Bapak Proklamasi karena beliau bersama Moh. Hatta adalah orang yang membacakan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu, beliau juga dikenal sebagai Bapak Bangsa yang banyak berperan dalam membangkitkan, menyatukan, memberikan jati diri bangsa dan kemudian meletakkan dasar Negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila yang disampaikan dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI.

Sukarno dilahirkan di Surabaya pada tanggal 6 Juni 1901. Ayahnya adalah seorang guru bernama Raden Soekemi Sosrodihardjo, sedangkan ibunya, Ida Ayu Nyoman Rai adalah seorang putri salah satu keluarga Bali dari kelas Brahmana/kelas Pendeta di Singaraja (Bali). Perkawinan kedua orang tua Sukarno, sekaligus juga merupakan perkawinan antarsuku dan juga antaragama. Pada tanggal 21 Juni 1970, Sukarno akhirnya meninggal dunia dengan meninggalkan tumpukan harta karun yang tidak ternilai harganya. Harta karun yang paling berharga yang diwariskan kepada bangsa Indonesia adalah pemikiran-pemikirannya tentang bagaimana menjadi “sebuah bangsa yang bersatu dalam perbedaan”.

Pulau-pulau Indonesia yang tersebar di sepanjang khatulistiwa dan didiami oleh suku bangsa yang berbeda, budaya yang berbeda, agama yang berbeda, bahkan ras yang berbeda, bukanlah merupakan calon-calon alamiah bagi negara Indonesia yang bersatu. Tetapi, Sukarno lebih dari pemimpin manapun telah berhasil menciptakan rasa persatuan dan harmoni dalam perbedaan di kalangan masyarakat Indonesia adalah satu gambaran mengenai sumbangan terbesar Sukarno. Lewat kata-katanya Sukarno menjembatani perbedaan-perbedaan, membawa bersama-sama berbagai elemen yang berbeda antarsuku-suku bangsa di Indonesia dan memberikan pandangan tentang identitas bersama (Legge, 1972: 16). Sukarno (dalam Cindy Adam, 2015: 106) menekankan “kita harus mengatasi prasangka kesukuan dan kedaerahan dengan menempa suatu keyakinan bahwa suatu bangsa itu tidak ditentukan oleh kesamaan warna kulit ataupun agama”. Oleh karena Sukarno sangat gandrung terhadap persatuan dan keinginannya menciptakan suatu bangsa yang multikultur telah membuatnya hidup dalam penderitaan kolonial, ditangkap, dipenjarakan, dan dibuang.

Sukarno mengajarkan kepada masyarakat Indonesia tentang arti bersatu dalam perbedaan dan bagaimana caranya hidup dalam perbedaan itu. Dalam berbagai kesempatan, Sukarno seringkali menekankan tidak hanya persatuan, tetapi juga bagaimana caranya hidup “toleran” antarsesama di atas perbedaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia toleransi adalah sifat atau sikap toleran, yaitu bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri (Tim Penyusun, 2008: 1722). Cara hidup toleransi dalam perbedaan agama adalah salah satu yang diajarkan oleh Sukarno kepada bangsa Indonesia, “Marilah kita menyusun Indonesia merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,” tetapi “biarkan masing-masing orang Indonesia bertuhan Tuhannya sendiri. Hendaknya tiap-tiap orang menjalankan ibadahnya sesuai cara yang dipilihnya. Marilah kita percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan hormat-menghormati satu sama lain” tutur Sukarno (dalam Adam, 2014: 241).

Dalam panggung sejarah bangsa Indonesia, kekuatan dari pemikiran-pemikiran Sukarno tentang toleransi telah terbukti dan teruji mampu menjadi obat pemersatu bangsa dengan segala keniscayaan perbedaannya. Pemikiran yang paling utama dapat ditemui dari konsep agung Pancasila, yang kedudukannya sampai sekarang tidak pernah tergantikan sebagai dasar dan ideologi bangsa Indonesia. Namun, ketika Bung Karno dilengserkan dari kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia, pemikiran-pemikirannya juga ikut tenggelam di dalam

kubangan lumpur rezim Orde Soeharto, sehingga dewasa ini pemikiran-pemikirannya tentang toleransi sudah tidak lagi menjadi lentera terang bagi bangsa Indonesia dalam mengelola kemajemukan bangsa. Basarah (2017: xxxii-xxxiii), bahkan menyebut selama 32 tahun pemerintahan Soeharto terjadi upaya “De-Soekarnoisasi”, berbagai langkah politik yang terstruktur, sistematis dan massif dilakukan untuk menghapus memori kolektif bangsa Indonesia tentang sosok, peran, sumbangsih dan pemikiran-pemikiran Bung Karno. De-Soekarnoisasi cepat sekali merebak seperti *endemic* yang menyerang ke mana-mana. Semua ajaram Bung Karno dinyatakan dilarang. Sampai-sampai dasar Negara “Pancasila” yang dirumuskan oleh Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945 harus diperlakukan sebagai bukan hasil pemikirannya (Sophiaan, 2008: 160).

Pasca lengsernya Sukarno sebagai nahkoda kapal Republik Indonesia berbagai konflik-konflik yang menyeret wacana primordial dan etnosentrisme telah beberapa kali terjadi di Indonesia, diantaranya konflik di Kalimantan (antara etnis Madura, Melayu, dan Dayak), di Ambon, Poso, dan Halmahera (kaum migran, pribumi, Muslim, Nasrani, klien-klien elit politik), kerusuhan sosial dan etnis Mei 1998 di Jakarta, dan konflik Aceh (Sukardi, 2016: 72). Oleh karena itu, ada kesan yang timbul bahwasanya sikap toleransi di Indonesia tenggelam bersamaan dengan kepergian Sukarno. Dalam situasi yang menghawatirkan ini, bangsa Indonesia seperti kaca yang pecah (Kasenda, 2014: 83). Jika meminjam perumpamaan dari Setiadi (2014: 11) “andai Bung Karno masih hidup atau terbangun dari tidurnya tentu beliau akan menangis sekaligus marah”. Berdasarkan penjelasan di atas, tidaklah berlebihan jika melalui artikel ini, penulis ingin memberikan tawaran untuk kembali menjadikan pemikiran-pemikiran Bung Karno tentang toleransi sebagai *leistar* (bintang pembimbing) kembali bagi bangsa Indonesia di era abad ke XXI dalam mengelola kemajemukan bangsa.

METODE PENULISAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian sejarah, yang meliputi langkah-langkah, yaitu sebagai berikut.

1. Metode pengumpulan data (*heuristik*), teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan artikel ini adalah melalui studi dokumen, berupa tulisan artikel, buku, dan dokumen-dokumen terkait.
2. Metode kritik sumber, yaitu a) *kritik ekstern* yaitu usaha untuk menentukan otentisitas atau keaslian sebuah sumber, dan b) *kritik intern* yaitu usaha untuk menentukan kredibilitas atau dapat tidak dipercayai data yang terkumpul.
3. Interpretasi, yaitu berupa menafsirkan fakta-fakta yang telah didapat dan masih lepas-lepas itu untuk bisa dihubungkan atau dirangkai-rangkaikan satu sama lain sehingga menjadi sesuatu kesatuan yang jelas relevansinya dan masuk akal.
4. Penulisan sejarah (historiografi) merupakan langkah terakhir yang ditempuh setelah fakta yang sudah dirangkai dan sudah dilengkapi dengan interpretasi yang melahirkan kontruksi sejarah yang utuh dan bermakna yang kemudian ditulis dalam penulisan cerita sejarah (historiografi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.1 PEMIKIRAN SOEKARNO TENTANG TOLERANSI

Sejak usia muda, Bung Karno sentiasa memikirkan suatu formula untuk menyatukan dan menciptakan keharmonisan berbagai macam perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Legge (1972: 63) bahkan menyatakan tugas utama Sukarno muda adalah "...menggulati perpecahan-perpecahan, mencoba mempersatukan tradisi-tradisi yang berbeda-beda dan mengejar cita-cita penyatuan ideologi dalam gerakan kebangsaan, menempatkan kepentingan masing-masing pihak ke bawah tujuan tertinggi perlawanan terhadap Belanda dan menciptakan suatu bangsa Indonesia". Pemikiran Sukarno tentang toleransi pertama kali ditulis tahun 1926 dalam *Suluh Indonesia Muda* mengenai persatuan antara golongan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dalam menghadapi musuh bersama. Sukarno dalam buku *Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I* mengatakan:

"...mempelajari antara ketiga sifat itu, membuktikan bahwa tiga haluan ini dalam suatu negeri jajahan tak guna berseteru satu sama lain, membuktikan pula bahwa ketiga gelombang ini bisa bekerja bersama-sama menjadi satu gelombang yang mahabesar dan mahakuat, satu ombak topan yang tak dapat ditahan terjangnya..." (Sukarno, 2015: 2).

Tulisan tersebut memiliki makna bahwa jika bangsa Indonesia ingin lepas dari belenggu penjajah maka antara masyarakat yang menggunakan ideologi Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme harus bersahabat dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka (Ricklefs, 2001: 378). Perseteruan dan permusuhan yang berlarut-larut antara ketiga ideologi tersebut tidak akan membawa bangsa Indonesia keluar dari belenggu penjajah, sehingga perjuangan yang tidak didasari oleh persatuan dan persahabatan hanya akan menjadikan bangsa Indonesia tidak berdaya terendam di dalam liang penjajahan. Sukarno berusaha untuk mempertemukan kenyataan obyektif dan keharusan historis bagi bersatunya tiga aliran politik dalam perjuangan antikolonial di Indonesia.

"Bukannya kita mengharap, yang nasionalis itu berubah paham jadi Islamis atau Marxis, bukannya maksud kita menyuruh Marxis dan Islami itu untuk berbalik menjadi Nasionalis, akan tetapi impian kita ialah kerukunan, persatuan antara ketiga golongan itu" (Sukarno, 2015: 6).

Legge (1972: 97) menjelaskan bahwa pada tahun 1926 "ia (baca: Sukarno) melihat gerakan kemerdekaan terpecah-pecah di sekitarnya". Bentrokan antara PKI dan Sarekat Islam adalah salah satu contoh dari sifat perpecahan itu. Di luar Sarekat Islam masih ada kelompok-kelompok yang lebih kecil dan didasarkan pada kesatuan suku, Jong Java, Pasundan, Jong Sumatra, dan terbelah-belahnya organisasi-organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah (Legge, 1972: 97). Hal tersebut dipertegas oleh Situmorang (2015: 68) yang menyatakan risalah tersebut ditulis akibat keprihatinan perseteruan Serikat Islam Putih pimpinan Agus Salim dengan Sarekat Islam Merah pimpinan Semaun dan akhirnya Sarekat Islam Merah berubah menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia), kemudian PKI dengan sejumlah basis kaum proletar di Jawa dan Madura melancarkan pemberontakan namun dengan mudah dapat ditumpas oleh pemerintah kolonial Belanda. Sukarno sadar

bahwa jika perpecahan itu tidak diatasi sekarang, maka hal itu bisa berakibat fatal bagi perjuangan kemerdekaan selanjutnya (Wardaya, 2006: 64).

Pada masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966), konsepsi tersebut dihidupkan kembali dengan konsep Nasakom. Akronim dari Nasakom adalah persatuan antara Nasionalis, Agama dan Komunis. Persatuan antara golongan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme serta konsep Nasakom harus juga dipahami sebagai doktrin Sukarno untuk menciptakan persatuan, kebersamaan, harmoni, dan toleransi antarideologi yang ada di Indonesia. Lebih tegas Bung Karno (dalam Cindy Adams, 2014: 355) menyatakan "Nasakom adalah sebutan yang mencakup ketiga kekuatan, di atas mana negeri kami didirikan". Menurut Kasenda (2014: 62-63) munculnya pemikiran Sukarno tentang persatuan golongan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme ataupun konsep Nasakom dimungkinkan karena dasar pemikiran Sukarno adalah dasar tradisional Indonesia yang tidak menerima keharusan untuk mengadakan pilihan (*entweder order*), melainkan melihat serta mencari persatuan dan kesatuan yang lebih dalam dan lebih tinggi antar-unsur yang seolah-olah bertentangan dan tidak dapat disintesiskan. Dasar pemikiran ini selalu mengusahakan harmoni atau keserasian dalam diri sendiri dan dalam masyarakat sebagai cermin dari keserasian atau harmonis kosmos. Akan tetapi, konsep tersebut mandapatkan penolakan berbagai pihak karena dirangkulnya komunisme. Untuk menjelaskan alasan konsepsinya itu, Sukarno memberikan tanggapan "Tapi adalah kenyataan, bahwa banyak orang komunis, yang tulang-belulanganya berserakan dalam kuburan-kuburan tanpa nama di Digul, adalah pejuang-pejuang besar kemerdekaan" (Adam, 2014: 355).

Jiwa muda Sukarno membawa dirinya pada dunia politik sudah terlihat sejak dia bersekolah di Surabaya dengan membentuk perkumpulan anak muda, yang disebut Jong Java. Hal itu berlanjut terus hingga beliau kuliah di Bandung. Dalam menggali dan menemukan idealismenya, terkadang ia berbaur dengan masyarakat. Salah satunya adalah penemuannya mengenai ideologi marhaenisme. Marhaenisme berasal dari sebuah nama seorang petani yang pernah ditemuinya ketika ia berkunjung ke persawahan pada masa ia kuliah di Bandung (Situmorang, 2015: 406). Dari pertemuan itu, "aku akan memakai nama itu untuk menamai semua orang Indonesia yang bernasib malang seperti dia! Semenjak itu kunamakan rakyatku Marhaen" tutur Sukarno dalam Cindy Adams (2014: 75). Marhaenisme adalah lambang dari penemuan kembali kepribadian nasional bangsa Indonesia (Situmorang, 2015: 407). John D. Legge (1972) memberikan analisis mengenai petani marhaen, "...si Marhaen mungkin tidak merupakan suatu sumbangan besar yang khas dalam dunia pemikiran politik, tetapi sesungguhnya konsep itu telah menampilkan suatu penilaian yang jujur tentang sifat masyarakat Indonesia".

Pada perspektif yang lain, konsep Marhaen juga dapat dimaknai sebagai salah satu usaha dari Sukarno untuk mensintesiskan berbagai macam identitas khas yang dimiliki oleh golongan-golongan yang hidup dalam kemiskinan dan kemelaratan yang selama ini saling bermusuhan. Kaum petani kecil adalah Marhaen, kaum proletar ala PKI adalah Marhaen, kaum Muslim yang hidup dalam penindasan kolonialisme dan imperialisme adalah juga Marhaen, rakyat jelata yang bukan petani pun adalah Marhaen, kaum pergerakan juga adalah Marhaen. Seorang Marhaen adalah orang yang memiliki alat-alat yang sedikit, orang kecil dengan milik kecil, dengan alat-alat kecil, sekedar cukup untuk dirinya sendiri yang telah

dimelaratkan oleh kolonialisme dan imperialisme (Adams, 2015: 75). Kasenda (2014: 153) berpendapat bahwa Marhaen menjadi lambang dari berjuta-juta petani, pedagang, dan perajin kecil Indonesia yang berwirasuasta, yang tidak menjadi pegawai, dan yang ingin hidup damai dengan harta miliknya yang kecil itu. Jadi, rakyat kecil yang menjadi korban penjajah yang hampir meliputi seluruh penduduk Indonesia adalah Marhaen (Adams, 2015: 75). Sementara itu, Marhaenisme adalah sebuah pemikiran ideologi yang membela kaum Marhaen atau kaum yang dimiskinkan oleh sistem (Susilo, 2008: 85). Oleh karena itu, rakyat Marhaen (mayoritas masyarakat Indonesia) harus bersatu untuk berjuang melawan sistem yang diciptakan oleh penjajah.

Pada tanggal 4 Juli 1927, Sukarno bersama Iskaq Tjokrohadisurjo, dr. Tjipto Mangunkusumo, Budiarto dan Sunarjo membentuk Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) dan pada tahun 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia (Legge, 1972: 110). Tujuan dari PNI adalah kemerdekaan sepenuhnya (Adams, 2014: 95), kemerdekaan politik bagi bangsa Indonesia dan dalam prinsip ini juga terkandung gagasan tentang suatu bangsa Indonesia yang akan dipersatukan oleh perjuangan bersama untuk mencapai kemerdekaan (Legge, 1972: 110). Terpilihnya Sukarno sebagai ketua PNI juga memiliki posisi politik yang sangat penting untuk menciptakan toleransi, kerukunan dan persatuan antargolongan, seperti yang dijelaskan oleh John D. Legge (1972: 112) di bawah ini:

“Juga penting pada tahap perkembangan organisasi nasionalis ini, sifat yang main lama makin terbina menjadi bagian integral dari gaya politiknya yaitu usahanya untuk mengatasi pendapat yang berbeda-beda, menekankan kerukunan dan keselarasan, serta untuk mempersatukan berbagai orang dan berbagai gagasan yang saling silang. Pada bulan-bulan setelah berdirinya PNI, tugasnya adalah mengumpulkan kembali pecahan-pecahan dari gerakan anti-kolonial yang telah berantakan itu”.

Pada akhir tahun 1927, Sukarno akhirnya berhasil merealisasikan suatu front persatuan dari organisasi-organisasi politik yang ada di Indonesia. Partai Sarekat Islam, Budi Utomo, Study Club Surabaya, serta organisasi-organisasi kedaerahan dan Kristen yang penting bergabung bersama PNI dalam suatu wadah yang dikenal sebagai PPPKI (Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia) (Ricklefs, 2001: 379). Kemudian, tahun 1928 dalam *Suluh Indonesia Muda*, Bung Karno menulis rasa syukurnya karena berbagai ideologi dan organisasi pergerakan mampu bersatu dalam PPPKI, “...semangat Persatuan Indonesia, ialah menyebabkan kini tiada lagi perselisihan antara pihak kanan dan pihak kiri, tiada lagi pertengkaran antara kaum “sabar” dan kaum “keras”, tiada lagi perceraiberaian antara kita dengan kita...” (Sukarno, 2015: 117). Keinginan Bung Karno agar seluruh perbedaan yang ada di Indonesia mampu hidup berdampingan dengan harmonis dan pada gilirannya harus bersatu padu dalam melawan berbagai macam ancaman dari imperialisme dan kolonialisme akhirnya menjadi kenyataan dengan masuknya organisasi-organisasi pergerakan ke dalam PPPKI.

“...di dalam wadah PPPKI ia (Baca: Sukarno) dapat menunjukkan kemampuannya untuk merukunkan satu golongan dengan yang lain dan meyakinkan berbagai macam golongan itu untuk menggalang kerjasama untuk mewujudkan cita-cita bersama” tulis Legge (1972: 113-114).

Pada tahun 1928, Perserikatan Nasional Indonesia berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Setahun kemudian, pemerintah kolonial Belanda menilai PNI sebagai organisasi yang membahayakan, karena menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan (Susilo, 2008: 19). Pada tanggal 29 Desember 1929, pemerintah Belanda menangkap tokoh-tokoh PNI di Yogyakarta di antaranya Sukarno, Gatot Mangkupraja, Soepriadinata, dan Maskun Sumadiredja. Sukarno kemudian diadili di Landraad, Bandung, bersama ketiga tokoh PNI lainnya. Sidang pengadilan kepada para tokoh yang ditangkap ini dilakukan pada tanggal 18 Agustus 1930. Dalam masa pengadilan inilah Sukarno menulis pidato *Indonesia Menggugat* dan membacakannya di depan pengadilan sebagai pleidoi.

Pleidoi Sukarno tersebut tetap saja membuat Sukarno masuk penjara. Setelah diadili di pengadilan Belanda, dia dan para tokoh PNI lainnya dimasukkan ke dalam penjara Sukamiskin, Bandung. Pada tahun 1931, kepemimpinan PNI berubah dari Ir. Sukarno ke Sartono. Sartono kemudian membubarkan PNI dan membentuk Partindo pada tanggal 25 April 1931. Moh. Hatta yang tidak menyetujui pembentukan Partindo akhirnya membentuk PNI Baru. Ketika masih di dalam penjara Sukarno telah mengamati perpecahan yang terjadi pada tubuh PNI dan setelah dilepaskan pada bulan 31 Desember 1931 hal pertama yang Sukarno soroti adalah pergerakan nasional yang dalam keadaan terpecah-pecah dan salah satu tugas utamanya adalah merancang lagi Anggaran Dasar PPPKI sebagai arah menghidupkan kembali koalisi yang kini berada dalam keadaan sekarat itu (Legge, 1972: 153). Selain itu, dengan terpecahnya PNI menjadi Partindo dan PNI Baru, Sukarno sedang dihadapkan pada dilema politik apakah akan bergabung dengan Partindo ataukah bergabung dengan PNI Baru. "Tidak ada pikiranku ke salah satu pihak, aku lebih condong untuk menempat keduanya kembali menjadi satu. Dua partai adalah bertentangan dengan keyakinanku mengenai persatuan" tutur Sukarno dalam Cindy Adams (2015: 140). Akan tetapi, Sukarno memilih jalan yang berbeda dengan memutuskan sikap untuk tetap berusaha menyatukan dan mendamaikan semua pecahan-pecahan partai pada masa-masa awal setelah kebebasannya.

"Para pemimpin Partindo yang datang kepadanya untuk membujuknya agar ia bergabung dengan mereka. Mereka mengajukan dalih bahwa Partindolah yang sesungguhnya adalah PNI Lama. Ia menolak. Untuk sementara ia tidak dapat menggabungkan dirinya ke dalam salah satu pihak. Karena bertindak demikian hanya akan mengukuhkan dan memperpanjang perpecahan. Apabila ia hendak mempersatukan mereka, ia harus tetap memegang kebebasannya" (Legge, 1972: 154).

Namun, tujuan mulia Sukarno yang ingin menyatukan kembali Partindo dan PNI Baru mengalami kegagalan, walaupun sudah berusaha semaksimal mungkin. Akhirnya, Sukarno memutuskan untuk masuk ke dalam kubu Partindo yang dianggapnya sesuai dengan dengan selera maupun ideologinya (Kasenda, 2015: 151). Meskipun Sukarno gagal di satu pihak untuk menyatukan Partindo dan PNI Baru, tetapi di pihak lain ia berhasil menjadikan konsep Marhaenisme agar diterima oleh partai sebagai dasar-dasar politik Partindo dalam kongres Juli 1933. Sikap Sukarno yang ingin menggabungkan kembali Partindo dan PNI Baru juga memiliki

makna mendalam untuk mengharmoniskan dan merukunkan kembali anggota-anggota PNI yang sebelumnya terpecah-pecah sebagai akibat ditahannya beberapa petinggi partai tersebut.

Hal menarik lainnya terkait dengan pandangan Sukarno tentang toleransi adalah ketika Sukarno secara terbuka mengatakan bahwa ia bukanlah seorang Ahmadiyah, namun Sukarno tetap menghargai mereka. Pada tahun 1936, publik digegerkan dengan sebuah pemberitaan bahwa Sukarno merupakan bagian dari aliran Ahmadiyah, bahkan Sukarno juga dikatakan telah mendirikan cabang Ahmadiyah dan menjadi propaganda Ahmadiyah bagian Celebes. Pemberitaan tersebut langsung ditanggapi oleh Sukarno, "Saya bukan Ahmadiyah. Jadi mustahil saya mendirikan cabang Ahmadiyah atau menjadi propagandisnya" tulis Sukarno (2015: 387). Bukan hanya Sukarno menolak dikatakan sebagai bagian dari Ahmadiyah, tetapi beliau juga mengatakan pula bahwa dirinya bertentangan dengan apa yang diyakini oleh golongan Ahmadiyah, "Saya tidak percaya bahwa Mirza Gulam Ahmad seorang nabi dan belum percaya pula ia seorang *Mujaddin*" tegas Sukarno (2015: 388). Namun, walaupun secara terbuka Sukarno menolak bagian dari Ahmadiyah dan apa yang diyakini oleh pengikut golongan Ahmadiyah, Sukarno tetap menghargai mereka. Tidak hanya itu, Presiden Sukarno pun sampai mengapresiasi dan berterima kasih pada Ahmadiyah yang menurutnya memberikan faedah keilmuan. Suatu hal yang sudah jarang dilakukan oleh pemimpin saat ini, "menolak ide suatu kelompok, namun tetap menghargai pendapat kelompok tersebut". Sikap Sukarno terhadap golongan Ahmadiyah adalah sebuah bentuk toleransi yang patut ditiru oleh masyarakat Indonesia.

Perjuangan dan konsistensi Sukarno dalam mengutamakan nilai-nilai toleransi, kerukunan serta persatuan Indonesia dalam setiap langkah politiknya juga terlihat dari pemikirannya yang paling penting tentang Pancasila. Pancasila merupakan inti sari dari ajaran-ajaran Sukarno tentang toleransi. Pidato yang diucapkan Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 dengan judul "*Pancasila*" merupakan usaha Sukarno untuk mewujudkan sintesis dari persatuan dengan melihat kenyataan yang ada pada masyarakat Indonesia (Kasenda, 2014: 133). Pidato Sukarno 1 Juni 1945 menggariskan lima prinsip dasar Pancasila yang dirasa akan membimbing dan memenuhi syarat sebagai dasar filsafat suatu Indonesia merdeka (Kasenda, 2014: 69). Menurut Sukarno kelima prinsip dasar tersebut adalah *kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan* (Sukarno, 2006: 147).

Prinsip pertama yang ditawarkan oleh Sukarno sebagai prinsip negara Indonesia merdeka adalah kebangsaan Indonesia. Basarah (2017: 147) memberikan pendapat bahwa prinsip kebangsaan Indonesia adalah "...sarana paling penting dalam membentuk dan mempersatukan masyarakat Indonesia yang terdiri dari banyak suku". Dengan 300 suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan di Indonesia, adanya bermacam-macam agama, seperti agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu, belum lagi yang disebut dengan kepercayaan "agama lokal" yang tumbuh subur di dalam pangkuan Ibu Pertiwi menyebabkan tanpa adanya prinsip kebangsaan Indonesia mustahil perbedaan-perbedaan tersebut akan mampu bersatu dan saling melengkapi kekurangannya satu sama lain dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bung Karno (dalam Cindy Adams, 2014: 25) menuturkan:

“Warna kulit kami mungkin berbeda, bentuk hidup dan dahi kami mungkin berlainan: orang Irian hitam, orang Sumatera sawo matang, orang Jawa pendek-pendek, penduduk Maluku lebih tinggi, orang Lampung memiliki ciri-ciri sendiri, mereka yang dari Pasundan juga memiliki ciri-ciri sendiri, tetapi kami tidak lagi merupakan penduduk asli atau orang asing. Sekarang kami sudah menjadi orang Indonesia. Semboyan negeri kami adalah *Bhineka Tunggal Ika* (Berbeda-beda tetapi tetap satu)”.

Dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Sukarno juga menjelaskan makna Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia, yaitu:

“...bangsa Indonesia, *natie Indonesia*, bukanlah sekedar satu golongan orang yang hidup dengan “*le desire d’etre ensemble*” daerah yang kecil seperti Minangkabau, atau Madura, atau Yogya, atau Sunda, atau Bugis, tetapi Bangsa Indonesia ialah seluruh manusia-manusia yang menurut geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah Saw. tinggal dikesatuannya semua pulau-pulau Indonesia dari ujung Utara Sumatera sampai ke Irian! Seluruhnya! Karena antara manusia 70.000.000 ini sudah ada “*le desire d’etre ensemble*”, sudah terjadi “*character gemeinschaft*” *Natie Indonesia*, bangsa Indonesia, umat Indonesia dengan jumlah orangnya adalah 70.000.000, tetapi 70.000.000 telah menjadi satu, satu, sekali lagi satu” (Sukarno, 2006: 136).

Inilah pemikiran Sukarno tentang toleransi yaitu “Kebangsaan yang bulat!”, bukan sebuah bangsa yang terpecah-pecah atas dasar ego keagamaan, kesukuan maupun kedaerahan. Nasionalisme “dalam artian yang sebenarnya” berarti “bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatra, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi menjadi satu *nationale staat*” (Legge, 1972: 213). Kasenda (2014: 117) memberikan penjelasan mengenai alasan Sukarno menetapkan “Prinsip Kebangsaan Indonesia” sebagai prinsip pertama dalam Pancasila yaitu, pilihan Sukarno tersebut dapat diartikan aspirasi tentang perlunya dasar negara Islam telah dikesampingkan dan ia menganggap cita-cita semacam itu sulit menampung aspirasi masyarakat Indonesia yang majemuk. Menurut Sukarno (dalam Kasenda 2014: 117), “istilah Negara Islam hanyalah merupakan rumusan ulama dan intelektual Islam belaka, tanpa dasar yang tegas dari sumber ajaran Islam. Oleh karena itu, tidak ada keharusan negara Islam, yang dituntut dari umat Islam adalah yang diterapkan etika Islam dalam negara yang didirikan”.

Namun, Bung Karno menggarisbawahi bahwa kebangsaan yang beliau tawarkan kepada bangsa Indonesia bukanlah kebangsaan yang *chauvinisme*, kebangsaan yang sempit, melainkan kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Legge (1972: 215) juga menyatakan nasionalisme atau kebangsaan Indonesia yang ditawarkan oleh Sukarno harus dipahami tidak dalam artinya yang sempit bebas dari kekuatan asing, tetapi dalam arti yang positif membangkitkan kesadaran dari rakyat. Dalam pidatonya di sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Sukarno memaparkan mengenai bahaya nasionalisme sempit, yaitu:

“Saudara-saudara. Tetapi... tetapi... memang prinsip kebangsaan ini ada bahayanya! Bahayanya ialah mungkin orang meruncingkan nasionalisme menjadi *chauvinisme*, sehingga berpaham “*Indonesia uber Alles*”. Inilah

bahayanya! Kita cinta tanah air satu, merasa berbangsa yang satu, mampu mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu kecil saja daripada dunia! Ingatlah akan hal ini” (Sukarno, 2006: 139).

Prinsip nasionalisme akan berbahaya jika menjadi patriotisme sempit dan perlu diimbangi dengan rasa hormat kepada bangsa-bangsa lain, yaitu internasionalisme. “Saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan, *“My Nasionalism is humanity”* dengan mengutip perkataan Gandhi (Sukarno, 139-140). Inilah prinsip kedua yang ditawarkan oleh Sukarno, yang beliau namakan “internasionalisme”. Tetapi Sukarno menekankan bahwa internasionalisme yang dimaksud, bukanlah kosmopolitisme, yang tidak mau akan adanya kebangsaan, yang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnya.

“Internasionalisme yang sejati adalah pernyataan dari nasionalisme yang sejati. Di mana setiap bangsa menghargai dan menjaga hak-hak semua bangsa, baik yang besar maupun yang kecil, yang lama maupun yang baru. Internasionalisme yang sejati adalah tanda bahwa suatu bangsa telah menjadi dewasa dan bertanggungjawab, telah meninggalkan sifat-sifat kekanak-kanakan mengenai rasa keunggulan nasional atau rasial, telah meninggalkan rasa kekanak-kanakan tentang chauvinisme dan kosmopolitisme” tutur Sukarno (dalam Basarah 2017: 145).

Kemudian, prinsip ketiga yang Sukarno tawarkan sebagai dasar Pancasila adalah mufakat atau demokrasi. Sukarno (2006: 141) menyatakan “negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan karya. Tetapi kita mendirikan negara “semua buat semua”, “satu buat semua, semua buat satu”. Demokrasi (pemerintahan perwakilan, atau musyawarah-mufakat) akan memungkinkan berlakunya keadilan bagi berbagai kekuatan untuk dengan jujur bersaing satu sama lain dalam kerangka perwakilan pemerintahan (Legge, 1972: 215-216). Menurut Kasenda (2014: 118) perlunya mufakat dapat dikaitkan dengan seruan yang penuh gairah oleh Sukarno pada golongan Islam agar tidak bersikeras menuntut pembentukan sebuah Negara Islam, yang tidak memungkinkan mendapat dukungan maupun kerja sama yang aktif dari golongan agama lainnya. Sukarno menolak pikiran suatu Negara Islam, tetapi ia menawarkan suatu jalan untuk memperoleh dukungan sebanyak mungkin di dalam sidang perwakilan, berikut penjelasan Sukarno (2006: 142):

“Badan Perwakilan, inilah tepat kita untuk mengemukakan tuntutan-tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpinnya rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita berkeja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagaimana yang terbesar daripada kursi-kursi Badan Perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam ... Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu, hukum Islam pula”.

Begitu juga sebaliknya, Sukarno juga menekankan jika golongan-golongan agama lainnya ingin hukum-hukum yang keluar dari dalam Badan Perwakilan Rakyat adalah hukum-hukum yang mereka kehendaki, maka mereka juga harus

bekerja sekuat-kuatnya agar kursi-kursi di dalam Badan Perwakilan Rakyat di sisi oleh golongan-golongannya. "Itu adil-*fair play*! Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjuangan di dalamnya" tutur Sukarno (2006: 143-144). Melalui mufakat ini, Sukarno mengharapkan agar semua golongan dapat berpartisipasi dalam kehidupan bernegara dan berbangsa secara adil.

Selanjutnya, Prinsip yang keempat adalah Kesejahteraan Sosial. Prinsip ini menekankan "...tidak akan ada kemiskinan di dalam Indonesia merdeka" (Sukarno, 2006: 144). Sukarno mensistematisasikan sila mufakat atau demokrasi dengan sila kesejahteraan sosial, artinya penyelenggaraan demokrasi haruslah bertanggung jawab kepada kesejahteraan sosial (Basarah, 2017: 155). Berikut ini penggalan pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang BPUPKI:

"Apakah kita mau Indonesia merdeka, yang kaum kapitalnya merajalela ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, yang semua orang cukup makan, cukup pakaian, hidup dalam kesejahteraan, merasa dipangku oleh ibu pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?"

Selain memiliki tujuan mulia untuk mempersatukan berbagai macam ideologi dan organisasi pergerakan yang ada di Indonesia dalam menghadapi musuh bersama, Bung Karno juga menyadari bahwa bangsa Indonesia merupakan suatu bangsa yang multireligius. Oleh karenanya, diperlukan pula prinsip "Ketuhanan" sebagai pedoman dasar oleh seluruh masyarakat Indonesia serta dapat dijadikan pula untuk menciptakan suasana yang hermonis dan toleran antarpemeluk agama di Indonesia. Inilah prinsip kelima yang Sukarno tawarkan kepada bangsa Indonesia, yaitu prinsip Ketuhanan. Sukarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan bahwa:

"Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia bertuhan tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya bertuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al Masih. Yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W., orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya negara Indonesia ialah Negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhan dengan cara leluasa. Segenap rakyat bertuhan secara kebudayaan, yakni tidak "egoisme agama" (Sukarno, 2006: 147-148).

John D. Legge (1972: 216) menjelaskan akhirnya Sukarno meminta dengan tegas supaya negara yang akan berdiri itu berdasarkan kepercayaan kepada ke-Esaan Tuhan, dan prinsip ini harus terbuka bagi pelaksanaan sikap tenggang-menenggang (toleransi) dan saling hormat-menghormati. Oleh karena itu, prinsip Ketuhanan menjadi penting kedudukannya mengingat kehidupan beragama dalam diri bangsa Indonesia sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Bahkan, lebih jauh lagi bangsa Indonesia merasakan kehidupan beragama tersebut harus diperjuangkan untuk terus berkembang secara baik. Oleh karena, agama-agama yang dipercayai oleh bangsa Indonesia tidak satu, maka prinsip Ketuhanan memberikan bimbingan kepada seluruh masyarakatnya untuk menata kehidupan secara beradab dan toleran antarumat bergama (Basarah, 2017: 142).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Sukarno sangat menekankan untuk saling hormat-menghormati antarpemeluk agama di Indonesia, “marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan cara berkeadaban. Apakah cara yang berkeadaban itu? Ialah hormat-menghormati satu sama lain” tegas Sukarno (2006: 148). Lebih lanjut penjelasan Sukarno tentang prinsip toleransi dalam kehidupan beragama, yaitu sebagai berikut:

“Marilah kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan bahwa prinsip kelima daripada negara kita ialah Ketuhanan yang berkebudayaan, Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, Ketuhanan yang hormat-menghormati satu sama lain” (Sukarno, 2008: 148).

Hal yang lebih membanggakan lagi dari sosok kharismatik Bung Karno adalah ketika beliau berpidato di muka Sidang Umum PBB ke-XV tanggal 30 Oktober 1960 dengan membawa pesan-pesan toleransi antarumat beragama di Indonesia kepada seluruh dunia. Di bawah ini adalah petikan pidato Sukarno, yaitu sebagai berikut:

“Bangsa saya meliputi orang-orang yang menganut berbagai macam agama. Ada yang islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha dan ada yang tidak menganut sesuatu agama. Meskipun demikian untuk delapan puluh lima persen dari sembilan puluh dua juta rakyat kami, bangsa Indonesia terdiri dari para pengikut Islam. Berpangkal dari kenyataan ini, dan mengingat akan berbeda-beda tetapi bersatunya bangsa kami, kami menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai yang paling utama dalam filsafah hidup kami. Bahkan mereka yang tidak percaya pada Tuhan pun, karena toleransinya yang menjadi pembawaan, mengakui bahwa kepercayaan kepada Yang Maha Kuasa merupakan karakteristik dari bangsanya, sehingga mereka menerima sila yang pertama ini” (Soemohadiwidjojo, 2017: 299).

Tidak sampai di sana, Sukarno juga memaparkan bahwa dua prinsip yang pertama, “kebangsaan” dan “internasionalisme atau perikemanusiaan” dapat diperas menjadi satu prinsip, yaitu “sosio-nasionalisme”. Kemudian, prinsip “mufakat atau demokrasi” dan “kesejahteraan sosial” dapat diperas pula menjadi “sosio-demokrasi”. Jadi tiga prinsip yang ada adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan ketuhanan (Tri Sila). Namun, ketiga prinsip tersebut masih dapat diperas kembali menjadi satu prinsip, yaitu “gotong-royong” (Eka Sila) (Sukarno, 2006: 150-151).

“*Gotong-royong* adalah membanting tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu bersama. Amal buat kepentingan bersama. Prinsip gotong-royong di antara yang kaya dan yang tidak kaya, antara yang Islam dan yang Kristen, antara yang Indonesia dan yang non-Indonesia” seperti yang dituturkan Sukarno (dalam Cindy Adams, 2014: 242).

Rumusan Pancasila Sukarno dapat dikatakan sebagai usahanya untuk memberikan kepada berbagai aliran politik yang terdapat di Indonesia, suatu landasan bersama di dalam negara Indonesia merdeka yang hendak didirikan (Kasenda, 2014: 121). Berbicara tentang Pancasila rumusan Sukarno, kekuatannya

terletak pada keberhasilannya mencerminkan pelbagai aspirasi yang terdapat di dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut akan sulit ditolak oleh kelompok manapun dalam bangsanya selama mereka benar-benar menghendaki pembentukan suatu negara merdeka yang luas wilayahnya membentang dari Sabang sampai Merauke. Di sinilah Sukarno berkedudukan penting sebagai politisi ulung yang bertindak sebagai “arsitek bangsa Indonesia” jika meminjam gagasan Kasenda (2014: 122).

Setelah sidang BPUPKI pertama berakhir dan menghasilkan lima prinsip dasar negara Indonesia merdeka, yaitu Pancasila. Panitia meneruskan kerjanya dengan mengadakan pembicaraan secara panjang lebar dan meminta saran-saran dari semua kalangan mengenai perlunya suatu konstitusi Indonesia. Panitia tersebut dikenal dengan nama Panitia Sembilan. Panitia kecil ini melahirkan sebuah dokumen, yang dikenal sebagai *Djakarta Charter* (Piagam Jakarta) yang merupakan hasil kompromi antara golongan nasionalis dengan golongan Islam. Menurut Legge (1972: 219) terdapat pasal yang gawat di dalam Piagam Jakarta, yaitu “...mengenai ketentuan bahwa Indonesia akan menjadi sebuah republik yang bukan saja berdasarkan persatuan, demokrasi dan keadilan sosial, tetapi juga berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan YME dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penganutnya”. Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945 kesepakatan yang terdapat di dalam Piagam Jakarta tersebut diubah pada bagian akhirnya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Sukarno. Hal penting yang diubah oleh panitia ini adalah tujuh kata setelah Ketuhanan, yang semula berbunyi “*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*”, diubah menjadi “*Ketuhanan yang Maha Esa*”. Selain itu, juga diubah klausul pasal pada batang tubuh UUD 1945 Pasal 6 ayat (1) mengenai syarat presiden. Semula ayat tersebut mensyaratkan presiden harus orang Indonesia asli dan beragama Islam, tetapi kemudian diubah menjadi hanya “orang Indonesia asli”.

Pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, perdebatan mengenai ideologi bangsa masih berlangsung, bahkan mengarah ke penggantian ideologi Pancasila. Presiden Soekarno menganggap bahwa demokrasi liberal dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga demokrasi terpimpin ditawarkan sebagai sebuah gagasan baru. Selain itu, partai-partai Islam di dalam Majelis Konstituante yang bertugas merumuskan UUDS 1950 menginginkan isi dari Pancasila digantikan dengan Piagam Jakarta serta dicantumkan dalam undang-undang dasar yang baru. Akhirnya, hari minggu tanggal 5 Juli 1959 jam 17.00, dalam suatu upacara resmi di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden, substansinya pembubaran konstituante, berlakunya kembali UUD 1945, dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Dekrit Presiden itu dikatakan pula tentang pembentukan Majelis Permusyawaratan Sementara dan pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara, yang akan diselenggarakan dalam waktu sesingkat-singkatnya (Poesponegoro dan Notosusanto, 2009: 283).

Dekrit 5 Juli 1959 dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk mencari jalan keluar dari kemacetan politik melalui pembentukan kepemimpinan yang kuat (Budiarjo, 2004: 71). Selain itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan juga merupakan tonggak sejarah Indonesia, karena telah berhasil menyelamatkan

bangsa dan negara, menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945 dari segala macam gangguan di berbagai bidang. Dekrit yang dilaksanakan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mendapatkan sambutan dari masyarakat Republik Indonesia yang pada waktu itu sangat menantikan kehidupan negara yang stabil. Namun kekuatan dekrit tersebut bukan hanya berasal dari sambutan yang hangat dari sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi terletak dalam dukungan yang diberikan oleh unsur-unsur penting negara lainnya, seperti Mahkamah Agung (MA) dan Kepala Satuan Angkatan Darat (KSAD) (Poesponegoro dan Notosusanto, 2009: 311).

Sikap Sukarno dalam mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa juga tercermin dari sikap politiknya yang menolak untuk membubarkan konsep Nasakom (Baca: pembubaran PKI) pasca terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pasca terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965 ratusan ribu, bahkan jutaan anggota PKI diburu, dibunuh dan dibantai di daerah-daerah karena dituduh telah terlibat dalam Gerakan 30 September 1965. Kendati ada desakan untuk membubarkan PKI, Presiden Sukarno tidak bergeming. Menurut penuturan Roeslan Abdulgani (dalam Kasenda, 2014: 130), Presiden Sukarno memiliki alasan tersendiri mengapa tidak membubarkan PKI, menurutnya "saya belum bubarkan saja sudah ada ratusan ribu rakyat yang mati dibunuh. Saya tidak mau kepemimpinan saya berlumuran darah. Cinta saya bukan kepada kedudukan, tetapi kepada rakyat, bangsa dan nearaku". Di samping itu, membubarkan PKI bertentangan dengan prinsip Sukarno yang gandrung pada persatuan dan harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam wawancaranya dengan penulis biografinya, Bernhard Dahm, Presiden Sukarno menyatakan bahwa dirinya tidak bisa membubarkan suatu partai secara keseluruhan hanya karena kesalahan beberapa orang. Presiden Sukarno masih merasa yakin bahwa konsep-konsepnya mengenai Nasakom (persatuan golongan nasionalis, agama dan komunis) pada dasarnya benar (Kasenda, 2014: 131).

Apapun latar belakang dan bentuk-bentuk pemikiran Sukarno muda, yang jelas ia tetap konsisten dengan pemikiran-pemikirannya tersebut sampai hari tuanya. Hal itu misalnya tampak ketika pada tanggal 17 Mei 1956, Presiden Sukarno mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan pidato di depan Kongres Gabungan Amerika Serikat dalam rangka kunjungan resminya ke Negara tersebut. Sebagaimana dilaporkan dalam halaman pertama surat kabar *New York Times* pada hari berikutnya, dalam pidato itu dengan gigih Sukarno menyerang Kolonialisme (Wardaya, 2008: 67). Bahkan, ketika seorang penulis biografi Sukarno, Bernhard Dahm, bertemu dengannya tahun 1966, Dahm mendapat kesan bahwa pada pecanpekan terakhir menjelang turunnya dari dunia perpolitikan Indonesia, Sukarno tetap konsisten dengan apa yang dia perjuangkan pada era 1920-an. Dia tetap mengharapkan bahwa di tengah pluralitas yang ada, bangsa Indonesia mampu membina persatuan dan ia tetap teguh pada perlawanannya terhadap kolonialisme dan imperialisme. Oleh karena itu, menurut Dahm pesan pokok Sukarno tetap sama yaitu di satu pihak melawan imperialisme sampai ke akar-akarnya, dan di pihak lain tetap mengupayakan membangun tatanan baru dengan jalan mempersatukan berbagai ideologi yang berbeda ke dalam suatu kesatuan yang harmonis.

Kegigihan Sukarno dalam mempertahankan PKI sebagai bagian integral dari sistem politik yang menjadi dasar pemikiran dan pemerintahannya mengakibatkan

sang presiden dituduh terlibat dalam peristiwa berdarah dan menyerahkan kekuasaannya pada sang pembunuh orang-orang komunis (Kasenda, 2014: 32). Bukan rahasia lagi jika Sukarno dijatuhkan oleh sebuah *creeping coup d'etat* (kudeta merangkak), kudeta merangkak sangat sistematis. Pada hari-hari terakhirnya, Sukarno harus menjalani kesengsaraan di sebuah karantina politik, sendiri dan kesepian. Sukarno tetap menjadi bapak yang mencintai semua rakyatnya, meskipun orang-orang di sekelilingnya telah mengkhianatinya. Saat itu, di tengah-tengah badai fitnah busuk dan ancaman perang saudara, ibu pertiwi laksana harimau lapar yang hendak memangsa anaknya sendiri, dan Sukarno justru menyerahkan dirinya sendiri, mengorbankan dirinya sendiri, dan rela tenggelam demi keutuhan bangsa dan negaranya.

1.2 RELEVANSI PEMIKIRAN-PEMIKIRAN BUNG KARNI DI ERA ABAD XXI

Secara geokultural, wilayah negara Indonesia merdeka terdiri dari ribuan pulau yang dihuni oleh penduduk dengan latar belakang berbagai suku bangsa, budaya, bahasa, dan agama/kepercayaan yang berbeda-beda. Berdasarkan data sensus pendudukan tahun 2000 diketahui bahwa jumlah etnik dan sub etnik yang terdapat di Indonesia adalah 1.340 suku bangsa. Bangsa Indonesia juga merupakan bangsa multi-religius yang terdiri dari agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dalam kelompok penganut agama besar masih terdapat berbagai aliran maupun sekte, belum lagi yang disebut dengan kepercayaan "agama lokal" atau ada yang menyebut sebagai "agama Nusantara" (Wirutomo, 2012: 52-53).

Kegagalan dalam mengelola potensi kemajemukan dan pluralitas di Indonesia dapat menyebabkan berbagai ketegangan, permusuhan dan konflik yang tidak berujung pangkal, bahkan bukan tidak mungkin terjadi segregasi dan disintegrasi (Handoyo, dkk, 2015: 23). Jika ditinjau dari aspek sejarah, potensi konflik tersebut sudah tergambarkan sejak jaman Hindia Belanda, seperti yang dikemukakan oleh Samuel (2010: 41), yaitu "masyarakat Hindia sudah dipecah melalui rekayasa identitas primordial para penduduknya". Hal tersebut ditekankan kembali dengan penjelasan dari Greertz, seperti yang dikutip Samuel (2010: 41-42), yakni:

"Sejumlah kelompok di Indonesia membedakan diri mereka dari kelompok lain dengan mengangkat hubungan darah, perbedaan ras, perbedaan bahasa, perbedaan wilayah tinggal, agama, ataupun adat kebiasaan. Keragaman *cultural* ini telah menciptakan jarak di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat sehingga ketegangan dan konflik menjadi sesuatu yang tak terhindarkan".

Pendiri-pendiri bangsa telah memahami hal tersebut dari sejarah bangsa yang menunjukkan bahwa berbagai suku bangsa di Nusantara ini amat mudah diadu domba oleh pemerintah Kolonial Belanda". Perbedaan etnis dan agama di Indonesia memang dengan sengaja dipupuk melalui strategi klasik bernama "*divide et impera*", or "*divide and conquer*" atau politik adu domba (Samuel, 2010: 43). Pendapat di atas juga didukung oleh Sukarno (dalam Cindy Adam, 2015: 106) yang menuturkan, yaitu sebagai berikut:

“Senjata imperialisme yang paling jahat adalah politik *divide et impera*. Belanda telah berusaha memecah-belah kita menjadi kelompok yang terpisah-pisah yang masing-masing membenci satu sama lain. Kita harus mengatasi prasangka kesukuan dan kedaerahan dengan menempa suatu keyakinan bahwa suatu bangsa itu tidak ditentukan oleh kesamaan warna kulit ataupun agama”.

Namun, berkat sumbangan pemikiran dan usaha-usaha tanpa lelah dari Sukarno, keterpecahan bangsa Indonesia dapat dipersatukan kembali dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kemerdekaannya diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dalam pandangan Sukarno, bangsa merdeka adalah bangsa yang komposisinya multietnis dan multirasial tetapi terikat pada kesetiaan terhadap tanah airnya dan bersedia berjuang demi kemerdekaan (Kasenda, 2014: 81). Penanganan berbagai macam perbedaan, pertentangan dan bahkan permusuhan yang terjadi pada era Sukarno, bukanlah melalui tangan besi melainkan melalui upaya menumbuhkan kesadaran mengenai pentingnya hidup harnomis, toleran, dan hormat-menghormati antarsesama demi tercipta persatuan dan kesatuan bangsa lewat tulisan, pidato dan sikap politiknya antara tahun 1926-1966.

Pasca lengsernya Sukarno sebagai presiden Republik Indonesia, pemikiran-pemikiran Sukarno sudah tidak lagi menjadi lentera terang dalam menghadapi potensi konflik yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pada jaman Orde Baru penanganan konflik lebih banyak bersifat hegemoni dan dominasi negara dan kekuasaan, sehingga tidak dapat memuaskan pihak yang berkonflik. Pada masa Orde Reformasi akhirnya potensi konflik tersebut bagaikan “tumpukan gunung es yang baru mencair”, yang mengakibatkan “banjir bandang” di seluruh Indonesia. Fakta menunjukkan pada masa Orde Reformasi sudah terjadi banyak konflik-konflik horizontal yang menyeret isu primordialisme dan etnosentrisme, seperti konflik Sampit di Kalimantan antara suku Dayak dan Madura yang mengakibatkan 500 korban jiwa dan sekitar 100.000 warga Madura kehilangan tempat tinggal pada 2001 (Suratman, 2017: 47). Konflik Ambon, Poso, dan Halmahera antara kaum migran, pribumi, Muslim, Nasrani, klien-klien elit politik, dan kerusuhan sosial dan etnis Mei 1998 di Jakarta (Sukardi, 2016: 72).

Selain itu, pada 2014 lalu, konflik suku Dani dan suku Moni di Papua yang disebabkan karena permasalahan lahan. Kemudian tidak berselang lama pada 2015 terjadi konflik Tolikara di Papua, yang ditandai dengan penyerangan pada umat Islam setelah menunaikan Sholat. Akhirnya masyarakat Indonesia juga tidak dapat menutup mata dengan panasnya tensi Pilkada DKI karena isu SARA membayangkannya berpotensi memicu konflik berskala nasional. Selain itu, gesekan antar ormas yang ada di ranah publik merupakan isu yang harus diperhatikan. Contoh konflik FPI (Front Pembela Islam) dan GMBI (Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia) pada 20 Januari 2017, merupakan contoh konflik antar ormas di Indonesia (Suratman, 2017: 47). Upaya-upaya pemisahan diri yang dilakukan beberapa wilayah, seperti Timor Timur (yang sudah lepas), Aceh (yang berbaikan), Maluku Selatan, dan Papua juga merupakan contoh konflik yang berusaha untuk memisahkan diri dengan NKRI (Kasenda, 2014: 82). Bahkan, tahun 1998 konflik yang bernuansa mistis pernah

terjadi di Banyuwangi, yaitu antara masyarakat dengan orang yang dituduh sebagai dukun santet.

Dalam situasi yang serba menghawatirkan ini, sering kali intervensi negara tidak memiliki kekuatan memaksa untuk menyelesaikan masalah. Tak pelak bangsa Indonesia seperti kaca yang retak. Di era abad XXI yang rentan terhadap potensi konflik inilah, perjalanan hidup Sukarno dan pemikirannya dapat dijadikan sebagai pegangan kembali untuk mempererat persatuan bangsa dan pengelolaan kemultikulturan bangsa. Sukarno melambangkan suatu generasi pendiri negara yang merasakan secara nyata bagaimana pentingnya arti Indonesia. Identitas baru sebagai bangsa Indonesia mungkin merupakan sesuatu yang sudah wajar, bagi generasi *post*-kolonial Indonesia. Tetapi, mereka yang mengalami periode zaman kolonial tentunya dapat bercerita banyak betapa sulitnya upaya untuk memperoleh predikat “menjadi seorang Indonesia” tersebut (Kasenda, 2014: 84). Pemikiran dan upaya Sukarno dalam mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari perbedaan ideologis, suku, agama, budaya, golongan dan lain sebagainya, merupakan hal yang patut selalu dijadikan pelajaran oleh bangsa yang sedang terjangkau perpecahan. Beliau mau menyelami, memahami dan merangkul suatu hal yang dianggapnya berbeda dan bertentangan (ideologi, agama, suku bangsa, ras, dan organisasi pergerakan), bukan malah melontarkan tuduhan dan menyuarakan kebencian yang justru memperkeruh suasana.

PENUTUP

Kesimpulan

Pemikiran dan upaya Sukarno dalam mewujudkan sifat dan sikap toleransi pada masyarakat multikultur di Indonesia dapat diketahui dari tulisan, pidato dan sikap politiknya antara tahun 1926-1966. Pada tahun 1926 dalam *Suluh Indonesia Muda* Sukarno menulis mengenai persatuan antara golongan Nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme dalam menghadapi musuh bersama, dan dipraktikkan menjadi Nasakom tahun 1960. Tulisan ini berisikan saran dan ajakan agar tiga golongan besar yang ada di Indonesia pada saat itu, mampu bersahabat dan bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan Indonesia merdeka. Pada tahun-tahun pergerakan nasional, Sukarno juga berhasil menggagas ideologi Marhaenisme, yaitu sebuah pemikiran ideologi perjuangan dari Sukarno yang bertujuan untuk membela kaum Marhaen atau kaum yang dimiskinkan oleh sistem kolonial.

Pada tanggal 4 Juli 1927, Sukarno berhasil membentuk Perserikatan Nasional Indonesia (PNI) dan pada tahun 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Kemudian pada akhir tahun 1927, Sukarno berhasil merealisasikan suatu front persatuan dari organisasi-organisasi politik yang ada di Indonesia, yaitu dengan mendirikan PPPKI (Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia). Ketika Sukarno duduk sebagai pimpinan PNI dan menjadi tokoh kunci di PPPKI, ia memanfaatkan posisinya untuk senantiasa mengatasi pendapat yang berbeda-beda, menekankan kerukunan dan keselarasan, serta untuk mempersatukan berbagai orang dan berbagai gagasan yang saling silang di Indonesia, dan yang lebih utama adalah meyakinkan berbagai macam golongan itu untuk menggalang kerjasama untuk mewujudkan cita-cita bersama. Pada tahun 1931, ketika Sukarno bebas dari penjara, ia mengupayakan penyatuan kembali

Partindo dan PNI Baru. Namun, tujuan Sukarno mengalami kegagalan dan akhirnya Sukarno bergabung dengan Partindo.

Hal menarik lainnya terkait dengan pandangan Sukarno tentang toleransi adalah ketika Sukarno secara terbuka mengatakan bahwa ia bukanlah seorang Ahmadiyah, namun Sukarno tetap menghargai mereka. Kemudian, pemikiran Sukarno tentang toleransi juga tercermin di dalam Pancasila. Pidato yang diucapkan Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan usaha Sukarno untuk mewujudkan persatuan bangsa dengan melihat kenyataan yang ada pada masyarakat Indonesia yang multikultur. Di dalam Pancasila, Sukarno menekankan sebagai bangsa yang memiliki tingkat keragaman, kemultikulturan, dan pluralitas yang tinggi sudah seyogyanya setiap masyarakat Indonesia harus senantiasa berusaha menjaga kerukunan dan toleransi antarmasyarakat dan bangsa yang berbeda. Oleh karena itu, bangsa Indonesia memiliki semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* (Berbeda-beda tetapi tetap satu). Kemudian, ketika Sukarno menjabat sebagai ketua PPKI, pada tanggal 18 Agustus 1945 Sukarno berhasil menengahi perbedaan yang terdapat di dalam anggota PPKI antara golongan Islam dan Nasionalis dan menghasilkan kesepakatan mengenai isi Piagam Jakarta, yaitu perubahan tujuh kata setelah Ketuhanan, yang semula berbunyi "*Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya*", diubah menjadi "*Ketuhanan yang Maha Esa*".

Sumbangan lainnya dari usaha Sukarno dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta menjaga nilai-nilai toleransi di dalam tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah ketika Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Presiden Sukarno mengeluarkan dekrit sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan juga menyelamatkan Pancasila dan UUD 1945 dari sikap partai-partai Islam di dalam tubuh Majelis Konstituante yang menginginkan isi dari Pancasila digantikan dengan Piagam Jakarta serta dicantumkan dalam undang-undang dasar yang baru. Akhir cerita dari kegandrungan Sukarno akan persatuan terlihat juga dari sikap politiknya yang menolak untuk membubarkan konsep Nasakom (Baca: pembubaran PKI) pasca terjadinya peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pembubaran PKI merupakan tuntutan dari angkatan darat dan masyarakat Indonesia karena menganggap PKI terlibat dalam penculikan dan pembunuhan petinggi-petinggi angkatan darat, namun Sukarno menganggap membubarkan PKI bertentangan dengan prinsip Sukarno (Nasakom). Kegigihan Sukarno dalam mempertahankan PKI mengakibatkan sang presiden dituduh terlibat dalam peristiwa berdarah tersebut dan di tengah-tengah badai fitnah dan ancaman perang saudara, Sukarno justru menyerahkan dirinya sendiri, mengorbankan dirinya sendiri, dan rela tenggelam demi keutuhan bangsa dan negaranya.

Jika mengamati konflik-konflik vertikal dan horizontal yang sering terjadi di Indonesia, maka pemikiran Sukarno tentang toleransi masih sangat relevan untuk diterapkan pada masyarakat Indonesia di era abad XXI. Pemikiran dan upaya Sukarno dalam mempersatukan berbagai perbedaan yang ada di Indonesia, mulai dari perbedaan ideologis, suku, agama, budaya, golongan dan lain sebagainya, merupakan hal yang patut selalu dijadikan pelajaran oleh bangsa Indonesia yang sedang mengalami kerawanan konflik. Beliau mau menyelami, memahami dan merangkul suatu hal yang dianggapnya berbeda dan bertentangan (ideologi, agama, suku bangsa, ras, dan organisasi pergerakan), bukan malah menyuarakan kebencian

yang justru memperkeruh suasana. Sukarno beranggapan aneka macam keragaman pada masyarakat Indonesia tidak serta merta dapat dijadikan jurang pemisah antar masing-masing suku bangsa, agama, ataupun budaya di Indonesia, akan tetapi hal tersebut harus dengan bijak dimaknai sebagai kekayaan dan kebanggaan bangsa Indonesia yang akan membedakannya dengan bangsa-bangsa lainnya di dunia. Oleh karena itu, sikap toleransi, kerukunan dan hidup harmonis antarsemasa harus senantiasa diutamakan demi terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa yang kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Cindy. 2014. *Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia*. Judul Asli "Sukarno an Autobiography as Told to Cindy Adams". Penerjemah: Syamsu Hadi. Yogyakarta: Media Pressindo dan yayasan Bung Karno
- Atmadja, Nengah Bawa. 2010. *Genealogi Keruntuhan Majapahit: Islamisasi, Toleransi, dan Pemertahanan Agama Hindu di Bali*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Basarah, Ahmad. 2017. *Bung Karno, Islam, dan Pancasila*. Ed. Rita Triana Budiarti. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress)
- Budiardjo, M. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Handoyo, Eko., dkk. 2015. *Studi Masyarakat Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Kasenda, Peter. 2014. *Bung Karno Panglima Revolusi*. Penyunting: Sigit Suryanto dan Uji Prastyana. Yogyakarta: Galang Pustaka
- Kasenda, Peter. 2014. *Sukarno, Marxisme & leninisme: Akar Pemikiran Kiri & Revolusi Indonesia*. Penyunting: Danang Wahansa S. Depok: Komunitas Bambu
- Legge, John. D. 1972. *Sukarno: Sebuah Biografi Politik*. Judul asli "Sukarno: A Political Biography". Penerjemah: TIM PSH. Jakarta: Sinar Agape Press
- Nasikun. 2013. *Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta: Ombak
- Poesponegoro , M. D. Dan Notosusanto, N. 2009. *Sejarah Nasional Indonesia VI*. Jakarta: Balai Pustaka
- Ricklefs, M. C. 2001. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Samuel, Hanneman. 2010. *The Development of Sociology in Indonesia: The Production of Knowledge, State Formation, and Economic Change "Dari Kolonialisme Belanda Hingga Modernisasi Amerika"*. Penerjemah dan Penyunting: Geger Riyanto. Depok: Kepik Ungu
- Setiadi, Andi. 2014. *Bung Karno Marah: Kecewaan Sang proklamato Pada Politikus Sekarang*. Ed. Kaka Alvin Nasution. Jogjakarta: Palapa
- Situmorang, Jonar T.H. 2015. *Bung Karno: Biografi Putra Sang Fajar*. Ed. Nur Hidayah. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Soemohadiwidjojo, Rhien. 2017. *Bung Karno Sang Singa Podium*. Ed. Redaksi Second Hope. Yogyakarta: Second Hope
- Sophiaan, Manai. 2008. *Kehormatan bagi yang Berhak: Bung Karno tidak terlibat G30S/PKI*. Jakarta: Transmedia Pustaka
- Sukarno. 2006. *Lahirnya Pancasila: Kumpulan Pidato BPUPKI*. Penyunting: Floriberta Aning. Yogyakarta: Media Pressindo
- Sukarno. 2015. *Dibawah Bendera Revolusi Jilid I*. Yogyakarta: Media Pressindo dan Yayasan Bung Karno

- Suratman, Yosua Praditya. 2017. *TAKSONOMI KONFLIK-KONFLIK INTERNAL DI INDONESIA SEBAGAI POTENSI PERANG PROXY*. Jurnal Pertahanan & Bela Negara Volume 7 Nomor 1. Halaman 39-52
- Susilo, Taufik Adi. 2008. *Soekarno: Biografi Singkat*. Ed. Abdul Qodir Shaleh. Jogjakarta: Garasi
- Tim Penyusun. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Wardaya, Baskara T. 2008. *Bung Karno Menggugat! Dari Marhaen, CIA, Pembantaian Massal '65 hingga G 30 S*. Yogyakarta: Galangpress
- Wirutomo, P. 2012. *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press)